

GUNAKAN BAKTERI PENGURAI Relawan Kelola Sampah



KR-Abdul Alim

TPA Sukosari Jumantono yang sudah overload.

KARANGANYAR (KR) - Penggunaan bakteri pengurai sampah menjadi solusi penanganan masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono Karanganyar. Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto mengatakan telah merekrut relawan yang akan mengerjakan metode pengelolaan TPA Sampah Sukosari Jumantono.

"Metode itu dinamakan fermentasi limbah organik dengan bantuan bakteri *anaerob*. Sampah organik difermentasi, sedangkan sampah anorganik seperti plastik diproses menjadi briket dengan cara *refused derived fuel* (RDF). Hasil fermentasi sampah dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik, sedangkan briketnya untuk bahan bakar," ungkap Rober, baru-baru ini.

Menurutnya, para relawan dikoordinir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karanganyar. Mereka punya latar belakang pegiat lingkungan yang sudah berpengalaman mengolah sampah menggunakan metode RDF di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

Saat ini TPA Sukosari Jumantono overload sampah. Sekitar 50 ton sampah yang masuk TPA tersebut setiap hari hanya ditumpuk saja. Akibatnya, bukit sampah longsor ke area pertanian milik warga. Aroma limbah juga mengganggu pernapasan warga sekitar, sehingga TPA tersebut sempat diblokade warga sekitar. (Lim)

GAGAL GINJAL MISTERIUS Belum Ada Kasus di Wonogiri

WONOGIRI (KR) - Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan belum ditemukan kasus gagal ginjal misterius pada anak di daerah Wonogiri.

Meski demikian, Pemkab bersama dinas terkait terus melakukan monitoring dan pengawasan intensif terhadap penyakit yang akhir-akhir ini menyedot perhatian banyak pihak itu.

"Saya pribadi menaruh perhatian khusus. Yang pasti, belum ada temuan kasus gagal ginjal misterius pada anak di sini (Wonogiri)," tandas Joko Sutopo kepada wartawan di pendapa rundin Bupati Wonogiri, Selasa (18/10).

Sejumlah langkah antisipatif telah ditempuh.

Menurut bupati, kasus gagal ginjal misterius pada anak yang akut bisa ditelaah, salah satunya dari pola makan dan konsumsi keseharian anak.

"Kemarin sempat muncul pemberitaan yang cukup mengagetkan semua

pihak. Langkah awal yang kami lakukan adalah meminta kepada sekolah-sekolah untuk melakukan monitoring terhadap kantin yang ada di sekolah," tegas bupati yang akrab disapa Jekek.

Jajanan yang ada di wilayah sekolah, lanjut Mas Jekek, harus dilakukan kualifikasi, baik standar kebersihannya maupun aspek-aspek bahan baku olahannya.

"Kalau sekiranya itu memenuhi kualifikasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ginjal pada anak, harus dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan," tegasnya.

Diungkapkan pula, yang juga perlu diperhatikan adalah pemahaman para pelaku ekonomi di lingkungan sekolah atau penjaja jajanan.

Harus terbangun pemahaman baru, bahwa semua makanan yang diujakan harus layak untuk dikonsumsi anak-anak. (Dsh)



KR-Djoko Santoso HP

Joko Sutopo

TAHUN 2021-2022 TERBAIK NASIONAL

Sukoharjo Raih Penghargaan JDIH

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo berhasil meraih penghargaan sebagai Pemkab Sukoharjo terbaik tahun 2021.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Rabu (19/10) mengatakan, penghargaan JDIH terbaik II tingkat nasional tahun 20-

22. Penghargaan serupa diterima Pemkab Sukoharjo pada tahun 2021. Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Rabu (19/10) mengatakan, penghargaan sudah diterima dalam acara pertemuan pengelola JDIH dan pemberian penghargaan bagi anggota terbaik tahun 2022 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penganugerahan

penghargaan bagi anggota terbaik diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (18/10).

"Pemkab Sukoharjo mengapresiasi penghargaan yang diterima dan patut dibanggakan. Apalagi penghargaan JDIH diraih Kabupaten Sukoharjo dalam dua tahun berturut-turut dan terbaik II tingkat nasional, dari 415 kabupaten se-Indonesia," ungkap Etik.

Penghargaan yang diraih akan dijadikan motivasi bagi Pemkab Sukoharjo untuk terus memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan program daerah sekaligus implementasi dari penghargaan JDIH

tingkat nasional yang diraih. Bupati berharap kualitas JDIH Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Sukoharjo, Retno Widiyanti Budiningsih menambahkan, penghargaan JDIH dimaksudkan untuk mendorong kabupaten/kota agar lebih meningkatkan pengelolaan JDIH pada masing-masing daerah. Selain itu juga agar pelayanan informasi produk hukum kepada publik bisa optimal, cepat dan akurat.

"Kami targetkan pengelolaan JDIH ke depan semakin baik sehingga menjadi juara pertama tingkat nasional," tandasnya. (Mam)



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menerima penghargaan JDIH.

HUKUM

KEPERGOK PETUGAS SATPOL PP Beri Uang ke Pengamen, Terancam Masuk Penjara

TEGAL (KR) - Memberi uang kepada pengamen di Kota Tegal harus hati-hati. Karena kalau ketahuan petugas, risikonya bisa dihukum. Seperti yang menimpa 3 wanita pengendara sepeda motor ini, terancam hukuman pidana dan denda Rp 50 juta.

Ketiga wanita itu ketahuan petugas Satpol PP, memberi uang kepada pengamen di Pertigaan Gili Tugel Kota Tegal, yang terjaring razia Satpol PP, Rabu (19/10). Razia itu dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto.

Tiga wanita muda itu sempat diamankan dan langsung diberikan pembinaan. Kepala Satpol PP, Hartoto, mengatakan untuk memastikan Kota Tegal bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Satpol PP rutin menggelar patroli dan razia.

Hasilnya, saat melintas di Persimpangan Gili Tugel didapati tiga pemotor perempuan yang tengah memberi uang kepada dua orang pengamen. "Kita sebenarnya patroli setiap hari. Kemarin kita dapati dua pengamen dan tiga orang yang tengah memberikan uang," ujarnya.

Hartoto menambahkan, jika mengacu pada peraturan yang ada (Perda No9 Tahun 2018), tindakan pengamen tersebut jelas-jelas pelanggaran. Termasuk warga dan masyarakat yang memberikan uangnya. "Karenanya kita mengambil tindakan. Saat ini, kita baru memberikan teguran dan pembinaan terhadap PMKS dan masyarakat yang melanggar," tegas Hartoto.

Namun, ke depan sanksi tegas berupa denda maksimal Rp 50 juta dan kurungan penjara paling lama tiga bulan akan diterapkan. Hal itu sesuai sanksi yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Perda No 9 Tahun 2018. Mekanismenya akan dilakukan melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring)," ungkap Hartoto. (Ryd)

Polres Bantul Instruksikan Kapolsek Razia Miras

BANTUL (KR) - Kapolres Bantul AKBP Ihsan, menginstruksikan kepala kepolisian sektor (Kapolsek) di jajarannya untuk mengencarkan razia minuman keras, menyusul tiga orang meninggal akibat menenggak minuman keras oplosan di daerah Jetis Bantul.

"Semua kapolsek saya kumpulkan untuk melaksanakan razia minuman keras dan akan saya beri target," jelas AKBP Ihsan, Rabu (19/10).

Dijelaskan, petugas Polres bersama jajaran Polsek sudah rutin me-razia minuman keras dan memusnahkan barang bukti botol berisi minuman yang telah diamankan petugas. "Kapolsek akan saya beri target, yang paling banyak akan diberi 'reward' atau penghargaan, termasuk yang sedikit tentunya menjadi penilaian dari saya terkait kinerja kapolsek," jelasnya.

Kapolres mengatakan dengan mengencarkan razia minuman keras diharapkan dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Ban-

tul, mengingat minuman keras bisa menjadi pemicu orang melakukan kejahatan.

"Kita akan beri target. Target kami berantas peredaran minuman keras di wilayah Bantul sehingga tidak terjadi korban-korban berikutnya. Minuman keras itu kan akar segala kejahatan, dan biasanya orang menganiaya karena sebelumnya mabuk," tegasnya.

Polres Bantul sebelumnya mendapat laporan ada tiga orang meninggal dunia setelah menenggak minuman keras oplosan jenis AL di salah satu rumah korban meninggal di wilayah Dusun Kowang, Desa Trimulyo, Jetis, Bantul, pada Kamis (13/10), sekitar pukul 20.00.

Terkait kasus tersebut, Kapolres sudah memerintahkan Kapolsek Jetis untuk segera membuat laporan sebagai dasar penyelidikan polisi untuk membuat terang perkara tersebut. "Saat ini prosesnya masih berjalan dan ada beberapa minuman keras sudah kami amankan yang diduga diminum para korban maupun orang-orang yang ada di situ. Jadi masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.

AKBP Ihsan mengatakan Polres bersama Polsek Jetis merencanakan otopsi jenazah korban meninggal untuk mengetahui pasti penyebab kematian, namun perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga korban. "Iya, kita rencanakan, tetapi balik lagi kepada keluarganya. Otopsi harus mendapat persetujuan keluarga, kalau keluarga tidak menghendaki kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi balik lagi ke pihak keluarga. Jika mereka sepakat, maka kita otopsi," tuturnya. (Jdm)

3.991 Pengendara Kena Tilang Elektronik

BANTUL (KR) - Ribuan pengendara di Bantul terkena tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE Statis maupun Mobile.

Kasat Lantas Polres Bantul, Iptu Fikri Kurniawan, Rabu (19/10), mengatakan tilang elektronik atau ETLE Statis adalah alat tilang elektronik yang ditempatkan secara permanen seperti di traffic light perempatan jalan. Sedangkan ETLE Mobile bisa ditempatkan berpindah-pindah seperti di mobil patroli polisi dan lainnya.

Secara rinci Iptu Ering mengungkapkan sebanyak 3.991 pengendara terkena ETLE Statis dan 63 pengendara lainnya terkena ETLE Mobile, dalam Operasi Zebra yang dilakukan sejak Senin (3/10) hingga Sabtu (15/10).

Adapun total pelanggaran selama Operasi Zebra Progo 2022 di Bantul tercatat sebanyak 10.884 pelanggaran, termasuk tilang elektronik maupun bukan. "Sebanyak 6.830 pelanggaran hanya diberi teguran dan itu sebagai bentuk peringatan kalau kembali melanggar maka bisa disanksi secara tegas," ungkap Iptu Fikri.

Dijelaskan, pula terdapat 1.265 pengendara yang tidak memakai helm. "Untuk yang lainnya ada yang kaca spion tidak lengkap, pemakaian knalpot blombongan. Ada juga kondisi motor tidak sesuai pabrikan dan lain sebagainya," ujarnya.

Sedangkan kejadian kecelakaan lalulintas (lakalantas) selama Operasi Zebra terjadi sebanyak 89 kali, dengan korban luka ringan 101 orang, luka berat dua orang. "Untuk kerugian materiil sebesar Rp 23.576.000," terangnya.

Dengan operasi rutin yang dilakukan petugas, Fikri berharap kesadaran warga untuk tertib berlalu lintas meningkat. "Tujuannya memang untuk menekan angka kecelakaan. Kami berharap kepada masyarakat selalu tertib dan bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas," tuturnya.

Sementara Kapolres Bantul, AKBP Ihsan mengatakan sosialisasi keselamatan berlalulintas terus dilakukan petugas. Selain menggelar operasi secara rutin, Polres Bantul juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pentingnya mematuhi berbagai

peraturan berlalulintas untuk keselamatan.

Kasi Gakkum Satlantas Polres Bantul Iptu Maryono SH selaku Kaposko, menyebutkan selama Operasi Zebra Progo 2022 diutamakan tindakan preventif dan edukatif. Tapi pelaku pelanggaran kasat mata seperti penggunaan knalpot blombongan tetap dikenakan Tilang.

Karena penggunaan knalpot blombongan, kebisingannya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. "Bahkan warga masyarakat yang tinggal di pinggir jalan juga terganggu ketenangannya. Karena itu pengendara kendaraan bermotor blombongan tetap ditindak sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Dengan berakhirnya Operasi Zebra Progo 2022, Satlantas Polres Bantul menggalakkan Operasi atau Patroli Simanis (Polisi Humanis), yang tujuannya juga sebagai upaya menekan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas.

Sehingga Patroli Simanis Satlantas Polres Bantul akan banyak mengadakan polkan edukasi dan mengingatkan kepada pengguna jalan agar selalu

mematuhi peraturan lalu lintas di jalan. Patroli Simanis berkeliling menggunakan sepeda motor yang sa-

rangnya ke jalur rawan pelanggaran dan di tempat umum yang banyak berkerumun orang. (Jdm)



KR-Judiman

Patroli Simanis mengutamakan edukasi dan mengingatkan pengendara kendaraan agar taat peraturan lalu lintas.